

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Trans-pacific partnership* merupakan sebuah perjanjian dagang yang diprakarsai oleh dua belas negara yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Jepang, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Singapura, Peru dan Vietnam. Perjanjian tersebut nantinya akan mencakup \$30 triliun Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan 40% PDB dunia. Jumlah yang sangat besar tersebut telah menyebabkan TPP menjadi pusat perhatian dunia. Apabila nantinya TPP telah diratifikasi maka kerjasama TPP ini akan menjadi kerjasama ekonomi terbesar yang pernah ada di dunia. Diperkirakan TPP akan meningkatkan PDB ekonomi dunia sebesar US\$ 223 miliar atau setara 0,2% pada tahun 2025 (Rajamoorthy, 2013).

Dalam perkembangannya *Trans-Pacific Partnership* telah mengundang banyak kritik dari berbagai pihak di negara-negara yang terlibat di dalamnya. Banyak kalangan yang menganggap bahwa TPP hanyalah alat bagi Amerika Serikat untuk masuk dan mendominasi ekonomi di kawasan tersebut. Meskipun Amerika Serikat dianggap menjadi tokoh utama dalam negosiasi TPP, Amerika Serikat bukanlah inisiator dari TPP itu sendiri. TPP pada awalnya diinisiasi oleh 3 negara, yaitu New Zealand, Chile, dan Singapura di sela-sela pertemuan APEC pada tahun 2002. Ketiga negara ini menyebut diri mereka sebagai Pacific Three atau P3. Kemudian pada tahun 2005, P3 berubah menjadi P4 ketika Brunei Darussalam

memutuskan untuk bergabung didalam proses negosiasinya. Negosiasi tersebut kemudian dirampungkan pada tahun 2006. Meskipun demikian, negosiasi mengenai sektor keuangan dan investasi ditangguhkan selama dua tahun.

Pada bulan Februari 2008 Presiden Bush mengumumkan bahwa AS akan bergabung kedalam negosiasi P4 mengenai sektor keuangan dan investasi yang ditangguhkan tersebut (Rajamoorthy, 2013). Keterlibatan AS dalam proses negosiasi tersebut dimulai pada bulan Maret 2008. Kemudian pada bulan September AS menyatakan akan berpartisipasi secara aktif dalam proses perundingan kesepakatan tersebut untuk memperluas kesepakatan *Trans-Pacific*. AS juga menyatakan akan bertanggung-jawab penuh terhadap seluruh proses perundingan yang berlangsung.

Untuk memperluas keanggotaan perjanjian ini, AS kemudian mengundang Australia, Peru dan Vietnam untuk bergabung kedalam kerjasama ini. Ketiga negara tersebut pun setuju untuk bergabung pada tahun yang sama. Pada tahun 2010, Malaysia juga diundang untuk bergabung kedalam kerangka kerjasama ini. Dengan bergabungnya Malaysia sebagai anggota kesembilan mereka, pengumuman mengenai munculnya blok kerjasama ini disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat pada pertemuan pemimpin-pemimpin APEC di Honolulu pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, rekan AS dalam NAFTA, Kanada dan Meksiko menunjukkan ketertarikan mereka untuk bergabung. Kemudian pada Desember 2012 kedua negara tersebut resmi bergabung dengan mengikuti proses perundingan yang ke lima belas di Auckland. Pada tahun 2013, Jepang menjadi anggota terbaru atau anggota ke dua belas dalam kerangka kerjasama ini dengan berpartisipasi dalam proses perundingan yang dilaksanakan di Kota Kinabalu, Malaysia. Selanjutnya

perjanjian baru itu dinamakan *Trans-Pacific Partnership* atau disingkat TPP. Setelah proses negosiasi yang panjang, perjanjian itu akhirnya disepakati tanggal 4 Oktober 2015 (Masykur, 2015).

Meskipun melibatkan sebagian besar negara-negara dikawasan Asia Pasifik, sejak awal proses perundingannya kerangka kerjasama TPP tidak pernah melibatkan China. Padahal China merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Asia. Hal ini jelas mengundang pertanyaan besar seputar mengapa China sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak dilibatkan dalam kerangka kerjasama sebesar TPP yang apabila telah diratifikasi akan menguasai 40% ekonomi dunia. Banyak pendapat yang menganggap hal ini merupakan upaya Amerika Serikat untuk membendung dominasi ekonomi China dikawasan Asia Pasifik. Melalui TPP Amerika Serikat berharap untuk meraih kembali kontrol terhadap perekonomian di Asia Pasifik yang selama ini dipegang oleh China.

Keberadaan TPP sendiri memiliki arti yang cukup signifikan bagi China. Apabila perjanjian TPP nantinya telah benar-benar diratifikasi oleh negara-negara anggota TPP, maka hal ini akan menimbulkan serangkaian tantangan dan peluang-peluang baru bagi perekonomian China.

Pertama, TPP akan semakin mengukuhkan kepemimpinan Amerika Serikat dan Jepang dalam ranah politik global dan memberikan keleluasaan untuk merundingkan serangkaian peraturan-peraturan baru. Dinamisme ini akan menimbulkan tantangan bagi China. Hal ini akan menciptakan kemungkinan bahwa dimasa yang akan datang aturan-aturan terhadap perekonomian global akan ditulis dibawah pengaruh AS, sama seperti yang sekarang sedang terjadi. Hal tersebut akan

membuat China merasa sangat tidak nyaman dan juga akan memberikan tekanan kepada China untuk segera mencari alternatif dari TPP yang menarik bagi negara-negara tetangga sembari merangkul seluruh kepentingan mereka.

Kedua, TPP akan merubah keseimbangan ekonomi dan hubungan aliansi di kawasan Asia. TPP akan meningkatkan kemungkinan bahwa Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk terus melanjutkan reformasi ekonominya, dengan demikian keberhasilan kebangkitan ekonomi Jepang juga akan meningkat. TPP akan menarik Vietnam dan negara-negara lainnya yang tergabung kedalam TPP semakin dekat dengan AS di bidang ekonomi, dan akan mengurangi kekuatan China di Asia Pasifik. Selain itu, fakta bahwa Korea Selatan juga akan segera bergabung dengan TPP, maka perubahan-perubahan ini akan memiliki dampak jangka panjang bagi perekonomian China.

Ketiga, kehadiran TPP akan menimbulkan tekanan dari dalam negeri China yang mendesak pemerintah China untuk segera melakukan reformasi ekonomi di China. China sendiri telah meluncurkan Shanghai Free Trade Zone (FTZ) dua tahun yang lalu sebagai bentuk dari reformasi ekonomi di China. Akan tetapi, Shanghai FTZ gagal memberikan dampak seperti yang diharapkan. TPP akan memberikan argumen baru bagi para pegiat ekonomi China untuk mendukung upaya-upaya perbaikan yang lebih substansial setelah ekonomi China mengalami tahun yang buruk (Naughton, Kroeber, Jonquieres, & Webster, 2015).

Kondisi tersebut mendorong banyak pihak untuk bertanya mengenai apa yang akan dilakukan oleh China untuk mengatasi tiga masalah diatas. Reaksi China dalam menyikapi terbentuknya kerjasama TPP ini sangat penting. Kebijakan yang diambil oleh China akan sangat menentukan arah perekonomian mereka. Meskipun

sebagian pihak mengatakan bahwa TPP tidak akan berdampak besar bagi perekonomian China, namun hampir bisa dipastikan bahwa China tidak akan tinggal diam dalam menyikapi TPP. Terlebih dengan diketahuinya terdapat motif tersembunyi AS untuk meruntuhkan hegemoni China dalam perekonomian di Asia Pasifik. China tentunya tidak akan membiarkan hegemoni ekonominya diganggu oleh AS.

Sejauh ini China menggunakan pendekatan *wait and see* dalam menyikapi kehadiran TPP di kawasan Asia Pasifik. China masih tetap bersikap netral terhadap kerangka kerjasama TPP. Seorang juru bicara dari Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa China akan selalu menyambut dengan pikiran terbuka semua kerjasama yang sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh WTO dan ikut serta dalam memajukan integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Juru bicara tersebut juga menambahkan bahwa kerjasama TPP merupakan salah satu perjanjian perdagangan yang penting di kawasan Asia Pasifik. China juga berharap kerjasama tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik.

Selain menggunakan pendekatan *wait and see*, China juga mulai serius untuk ikut serta kedalam kerjasama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Sebuah kerangka kerjasama yang beranggotakan sepuluh negara-negara anggota ASEAN dan enam negara besar Asia lainnya yaitu, Australia, China, India, Japan, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Kerjasama RCEP ini sejatinya digagas oleh negara-negara anggota ASEAN bersama dengan rekan-rekan FTA-nya pada November 2012. Enam belas negara ini mewakili lebih dari 3 juta penduduk dunia, memiliki total GDP sebanyak US\$ 27.7 Triliun dan mewakili hampir 30% perdagangan dunia. Perjanjian ini juga

meliputi area-area inti perdagangan yaitu perdagangan barang, jasa investasi, kerjasama ekonomi, kekayaan intelektual, kompetisi, penyelesaian masalah dan isu-isu terkait lainnya.

Meskipun perundingan mengenai kerangka kerjasama ini baru dimulai, akan tetapi China telah mengambil inisiatif untuk terus mendorong negara-negara lainnya untuk segera merampungkan proses perundingan kerangka kerjasama RCEP ini. Peran besar China semakin terlihat ketika China berusaha untuk menyelesaikan proses perundingan di tahun 2015 lalu. Melalui berbagai perundingan kerjasama RCEP yang telah dilaksanakan, China semakin terlihat mengambil alih proses perundingan tersebut. Bahkan beberapa pihak menyebutkan bahwa kepemimpinan RCEP saat ini telah berada ditangan China. Sama seperti kasus TPP ketika AS mengambil alih proses perundingan yang sedang berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa ada suatu kepentingan China yang sedang diupayakan oleh China lewat kerjasama RCEP ini.

Secara politik, RCEP dapat dimanfaatkan sebagai sebuah fondasi yang dapat memperluas kerangka diplomasi dan ekonomi China, “*One Belt, One Road*” (OBOR) dimana dampak integrasi nya akan berharga untuk ASEAN. Tujuan China melalui OBOR adalah untuk memperkuat ikatan ekonomi yang saat ini telah terjalin dengan Eurasia, serta untuk mengamankan persediaan komoditas China. RCEP akan memainkan peran penting dalam OBOR untuk mempromosikan perdagangan dan investasi di Asia, karena tujuh dari sepuluh mitra dagang terbesar China berada di Eurasia. Sementara tujuan dari 10 mitra dagang terbesar ASEAN berada dalam negosiasi RCEP. China dan ASEAN memiliki kesamaan kepentingan dalam menjaga stabilitas dan integrasi Asia melalui RCEP.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, muncul suatu rumusan masalah yang ditemukan oleh penulis, yaitu: “Mengapa China memutuskan untuk lebih memilih bergabung kedalam kerangka kerjasama *Regional Comprehensive Economic Partnership* dibandingkan *Trans Pacific Partnership*?”

## **C. Landasan Teoritik**

### *Securitization Theory*

Teori merupakan alat yang menggabungkan dan merangkai konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, yaitu suatu pekerjaan yang mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan (Masoed, 1990). Dalam membahas permasalahan perundingan kerjasama *Regional Comprehensive Economic Partnership* yang diupayakan oleh China, penulis menggunakan teori *Securitization* yang dikemukakan oleh Barry Buzan. Berikut adalah pemaparan mengenai teori tersebut:

*“Security is taken to be about the pursuit of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against forces of change, which they see as hostile. The bottom line of security is survival, but it also reasonably includes a substantial range of concerns about the conditions of existence. Quite where this range of concerns ceases to merit the urgency of the “security” label (which identifies threats as significant enough to warrant emergency action and exceptional measures including the use of force) and becomes part of everyday uncertainties of life is one of the difficulties of the concept” (Buzan, New Patterns of Global Security, 1991).*

Pertanyaan seputar konsep *security* telah banyak memenuhi pikiran para akademisi ilmu Hubungan Internasional. Konsep tradisional mengenai *security* dengan negara sebagai aktor utama telah menjadi sebuah perdebatan yang besar. Dalam bukunya, *People, States and Fear*, Barry Buzan menyebutkan bahwa menurut pandangan kaum realis *security* merupakan turunan dari konsep *power* pernyataan ini menyederhanakan konsep *security* yang kompleks menjadi sebatas persamaan dari konsep *power* (Buzan, *People, States and Fear*). Pandangan seperti ini sejatinya sangat relevan pada periode Perang Dunia dimana negara-negara berjuang untuk mendapatkan *power*. Akan tetapi pada era pasca Perang Dingin, konsep *security* telah menjadi semakin kompleks. Barry Buzan mengatakan dalam bukunya konsep *security* yang ada selama ini terlalu dipaparkan secara sempit (*People, States and Fear*, p. 14). Melalui bukunya tersebut Barry Buzan bertujuan untuk memberikan kerangka teori yang lebih luas mengenai konsep *security* (*People, States and Fear*, p. 20) dengan memasukkan konsep-konsep tambahan yang sebelumnya tidak termasuk didalam konsep *security* yang ada selama ini, seperti *regional security* dan *environmental sectors of security*.

Pendekatan Buzan dalam memahami konsep *security* merupakan sebuah pendekatan yang unik. Hal ini disebabkan karena ia melihat *security* melalui berbagai macam sudut pandang. Pendekatan seperti ini menghasilkan sebuah pemikiran konsep yang baru mengenai *security* itu sendiri. Dimensi didalam konsep *security* juga menjadi semakin luas dengan melibatkan banyak hal dari sektor makro hingga ke mikro. Berbagai macam aspek sosial juga turut dimasukkan oleh Buzan. Selain itu Buzan juga menambahkan bagaimana cara masyarakat mengkonstruksikan pandangan mengenai ancaman.



Pendekatan seperti ini sejatinya tidak dapat dilepaskan dari latar belakang Buzan yang merupakan seorang pemikir dari kalangan *English School* yang selama ini terkenal sangat menjunjung tinggi pluralisme dalam memandang berbagai fenomena dalam Hubungan Internasional. Hal ini menjadikan Buzan menjadi seorang pemikir yang independen dan reformis. Oleh karena itu Buzan mampu memberikan pemaparan yang lebih luas kepada para pembacanya seputar konsep *security*. Pendekatan yang digunakan oleh Buzan ini juga telah memberikan pemahaman mengenai konsep *security* yang lebih utuh kepada para pembacanya yang kemudian sangat membantu para pembacanya dalam memandang kompleksitas konsep *security* dan penerapannya terhadap berbagai macam isu yang ada dalam Hubungan Internasional.

Analisis Buzan terhadap konsep *security* dapat dikatakan sebagai sebuah perpaduan antara pemikiran neorealisme dan konstruktivisme. Ia sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh kaum neorealisme bahwa dunia ini berada dalam sebuah kondisi anarki yang menyebabkan tidak adanya *power* yang lebih tinggi di atas negara. Akan tetapi, Buzan memandang pemikiran kaum neorealisme yang menganggap bahwa *security* adalah murni persoalan *struggle for power* adalah sebuah pemikiran yang telah usang. Dalam karyanya, *People, States and Fear*, Buzan merumuskan sebuah konsep yang memiliki cakupan yang lebih luas. Konsep tersebut meliputi lima sektor *security* yang lebih relevan dengan permasalahan dunia kontemporer. Kelima sektor tersebut ialah; sektor politik, sektor militer, sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor lingkungan.

Seperti yang dikemukakan oleh Buzan artikelnya yang berjudul “*New Patterns of Global Security in the Twenty- First Century*”, kelima sektor tersebut

memiliki keterkaitan masing-masing sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mendefinisikan poin-poin penting didalam problematika *security*, dan merupakan sebuah cara untuk menentukan prioritas, namun semua hal itu berpadu dalam sebuah jaringan keterkaitan yang luas.

### ***Military Threats***

Ancaman yang paling nyata hadir dari sektor militer, yang mana sektor ini mampu meberikan ancaman terhadap sebuah negara dalam beberapa level. Ancaman militer dapat mempengaruhi semua kompoen yang ada dalam sebuah negara. Ancaman tersebut dapat mempertanyakan tugas paling dasar dari sebuah negara untuk mampu melindungi warga negaranya sekaligus memberikan efek yang merugikan pada “lapisan sosial dan kepentingan individu” (People, States and Fear, p. 119). Tingkatan serta tujuan dari ancaman militer dapat diletakkan pada sebuah skala kepentingan yang berbeda, ditambah dengan fakta ancaman tersebut melibatkan penggunaan kekuatan menempatkan ancaman militer pada kategori khusus dalam *security*.

### ***Political Threats***

Ancaman politik juga merupakan sebuah perhatian khusus bagi sebuah negara, akan tetapi ancaman politik dan ancaman militer memiliki sebuah persamaan yang tidak jelas dan sulit untuk diidentifikasi. Sebagaimana negara itu sendiri yang merupakan sebuah entitas politik, maka ancaman politik yang bertujuan untuk melemahkan entitas tersebut juga dapat disamakan sebagai sebuah ancaman militer. Ancaman tersebut dapat berbentuk kompetisi diantara berbagai macam ideologi, atau dapat pula berbentuk sebagai sebuah serangan terhadap

negara itu sendiri. Bagaimanapun, sangat penting untuk dapat membedakan antara ancaman politik yang disengaja dengan “*those that arise structurally from the impact of foreign alternatives on the legitimacy of states*” (People, States and Fear, p. 120).

### ***Economic Securities***

Sifat alami dari sektor ekonomi itu sendiri membuat ancaman terhadap sektor ekonomi lebih sulit untuk ditentukan. Sebagaimana yang telah dikemukakan Buzan, “the normal condition of actors in a market economy is one of risk, aggressive competition and uncertainty” (People, States and Fear, p. 124). Sifat alami yang tidak menentu ini membuat *security* di sektor ekonomi sulit untuk diuraikan. Batasan antara ketidakstabilan yang masih dapat diterima dengan sebuah ancaman yang sesungguhnya menjadi lebih sulit untuk diidentifikasi. Hal ini terlihat pada saat terjadinya krisis ekonomi di AS, terjadi perdebatan yang cukup besar mengenai bagian mana saja dari ekonomi AS yang harus diselamatkan dan mana saja yang diabaikan.

### ***Societal Security***

*Security* di sektor sosial kemungkinan dapat dikatakan sebagai yang paling menarik diantara kelima sektor *security*. Meskipun sulit untuk dipisahkan dari *security* sektor politik, *security* sosial sejatinya adalah persoalan identitas dan keseimbangan yang dapat ditemukan dalam setiap negara. Negara-negara lemah seringkali dihadapkan pada permasalahan mengenai perbedaan identitas dan budaya. Kebanyakan konflik yang terjadi belakangan ini merupakan konflik yang didalamnya terdapat elemen sosial. Maka dari itu, sangat penting untuk

memperhitungkan sektor ini ketika sedang mempelajari *security* pada tingkatan makro.

### ***Enviromental Sector***

Sektor lingkungan merupakan sektor yang paling sulit untuk didefinisikan serta merupakan sektor yang paling kontroversial. Ketika membicarakan soal ancaman dari alam, orang pasti akan beranggapan hal itu adalah “perjuangan manusia berhadapan dengan alam” seperti gempa bumi dan badai. Kejadian-kejadian tersebut sangat tidak mungkin untuk dikendalikan. Masalah-masalah terbaru yang dihadapi oleh manusia telah mengakibatkan berbagai fenomena kerusakan alam seperti pemanasan global, polusi, menipisnya lapisan ozon dan masih banyak lagi. Fenomena-fenomena tersebut merupakan variabel yang sangat memungkinkan untuk dikendalikan oleh manusia ketika menyangkut perosalan lingkungan. Jika masalah ini semakin membesar kedepannya, maka *security* dalam sektor lingkungan akan semakin mendapatkan perhatian oleh negara.

### **D. Hipotesa**

China memutuskan ikut bergabung kedalam proses perundingan kerjasama *Regional Comprehensive Economic Partnership* dikarenakan dua hal:

1. China melihat kerangka kerjasama TPP sebagai sebuah ancaman bagi kepentingan nasional nya di kawasan Asia-Pasifik.
2. China melihat RCEP sebagai sebuah kerangka kerjasama alternatif dari TPP yang menawarkan keuntungan yang lebih besar bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

## **E. Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan tidak terlalu melebar dan tidak keluar dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penyusunan skripsi ini. Penulis hanya akan membahas sepak terjang kerangka kerjasama TPP sampai pada tahun 2016, yaitu sebelum Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari keanggotaan TPP dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Setelah itu penulis akan memaparkan pandangan China terhadap kerangka kerjasama TPP tersebut serta penulis akan menganalisa peran China dalam proses perundingan kerjasama RCEP yang disebut oleh banyak pihak sebagai sebuah kerangka kerjasama tandingan bagi TPP.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menganalisa peran China dalam proses perundingan kerjasama RCEP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan melalui studi literatur yang berhubungan dengan konsep yang digunakan serta sumber-sumber lainnya yang menunjang penelitian

### **2. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel surat kabar, baik cetak maupun elektronik yang membahas mengenai kasus yang diangkat dalam penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dalam bentuk narasi.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan bahasan dan materi yang diteliti.

**Bab I :** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang alasan pemilihan judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teoritik, Hipotesa, Batasan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**Bab II :** Didalam bab ini penulis akan membahas bagaimana arah kebijakan luar negeri China dalam menentukan keikutsertaannya di sebuah kerjasama multilateral. Kemudian bab ini juga akan membahas mengenai pandangan China terhadap kerangka kerjasama TPP.

**Bab III :** Didalam bab ini penulis akan memberikan elaborasi secara mendalam mengenai *Regional Comprehensive Economic Partnership*, mulai dari sejarah pembentuk hingga dampaknya dalam regionalisme dan perdagangan internasional. Pada bab ini penulis juga akan mengemukakan keterlibatan China dalam proses negosiasi kerangka kerjasama ini.

**Bab IV :** Bab ini merupakan uraian yang menceritakan mengenai penjelasan penulis tentang hasil penelitian mengenai ancaman TPP bagi China dilihat dari lima sektor *security* yang dikemukakan oleh Barry Buzan dalam *Securitization Theory*. Bab ini juga memberikan analisis mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh China untuk mempromosikan kerangka kerjasama RCEP sebagai kerjasama alternatif dari TPP yang telah gagal direalisasikan.

**Bab V** merupakan kesimpulan dari keikutsertaan China dalam kerjasama RCEP sebagai respon terhadap TPP. Bab ini membahas mengenai inti dari bab dan sub bab yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai penutup.